

65

tahun  
Purnatugas  
Ibu Sri Mariati

KEPE  
PRESS

Tim Editor:  
Novi Anoerajekti  
Heru S.P. Saputra  
Titik Maslikatin  
Zahratul Umniyyah

# TEORI KRITIS dan **METODOLOGI**

Dinamika Bahasa,  
Sastra,  
dan Budaya

Kata Pengantar: Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum.

**TEORI KRITIS DAN METODOLOGI**  
**Dinamika Bahasa, Sastra, dan Budaya**

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **Lingkup Hak Cipta**

#### **Pasal 1**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Ketentuan pidana**

#### **Pasal 113**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

# **TEORI KRITIS DAN METODOLOGI**

## **Dinamika Bahasa, Sastra, dan Budaya**

**Tim Editor:**

**Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum.**

**Dr. Heru S.P. Saputra, M.Hum.**

**Dra. Titik Maslikatin, M.Hum.**

**Zahratul Umniyyah, S.S., M.A.**



**2019**

# TEORI KRITIS DAN METODOLOGI

## Dinamika Bahasa, Sastra, dan Budaya

© Penerbit Kepel Press

Tim Editor:

Prof. Dr. Novi Anoeграjekti, M.Hum.

Dr. Heru S.P. Saputra, M.Hum.

Dra. Titik Maslikatin, M.Hum.

Zahratul Umniyyah, S.S., M.A.

Desain Sampul:

Muhammad Zamroni

Desain Isi:

Safitriyani

Cetakan Pertama, Juni 2019

Diterbitkan oleh Program Studi Sastra Indonesia Fakultas  
Ilmu Budaya Universitas Jember dan HISKI Komisariat Jember  
bekerjasama dengan Penerbit Kepel Press

Puri Arsita A-6, Jl.

Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta

Telp: (0274) 884500; Hp: 081 227 10912

email: amara\_books@yahoo.com

**ISBN : 978-602-356-247-3**

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis  
dan penerbit.

Percetakan Amara Books

Isi diluar tanggung jawab percetakan

## DAFTAR ISI

Prawacana Editor ~ v

Prawacana Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember ~ ix

Prawacana Ketua Umum Hiski Pusat ~ xiii

### WACANA UTAMA

1. Ekokritik (*Ecocriticism*) sebagai Disiplin Ilmu Baru dalam Studi Sastra Indonesia
  - Prof. Dr. Setya Yuwana Sudikan, M.A. ~ 3
2. Metodologi Penelitian Sastra dan Budaya: Karya Sastra dan Pergulatan Budaya
  - Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M. Hum.,  
Dr. Agus Sariono, M. Hum., Dr. Endah Imawati, M.Pd. ~ 57
3. Otoetnografi sebagai Metode Kajian Antropologi Sastra
  - Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd. ~ 81
4. Empat Puisi Wahyu Prasetya Periode Haribaanmu
  - Mardi Luhung ~ 99

### WACANA KEBAHASAAN

1. Kritik atas Penggunaan Metode Linguistik Struktural untuk Analisis Teks dalam Kajian Linguistik Interdisiplin
  - Kusnadi ~ 119
2. Fenomena di Balik Ungkapan: *Becik Ketampik, Ala Ketampa 'Baik Ditolak, Buruk Diterima'*
  - Sudartomo Macaryus ~ 129
3. *Pasemon* sebagai Bahasa Kritik dalam Seni Pertunjukan Masyarakat Madura
  - Akhmad Sofyan, Panakajaya Hidayatullah,  
dan Ali Badrudin ~ 143

4. Fauna sebagai Konsep Ekofeminisme dalam *Panyandra Tubuh Indah Perempuan Jawa*:
  - Agustina Dewi Setyari ~165
5. Tradisi Tuturan Mahasiswa: Ungkapan-Ungkapan yang Disukai dan Tidak Disukai (Kajian Psikolinguistik)
  - Asrumi ~ 179
6. ♥ Tak Harus Cinta: Analisis Multimodal Penggunaan *Modes* Verbal dan Visual pada Komunikasi di Media Sosial
  - Didik Suharijadi ~ 199
7. Makna Kalimat Imbauan dan Sanksi dalam Pemertahanan Tradisi Jamu pada Masyarakat Bangkalan dan Sumenep Madura
  - Ekna Satriyati ~213
8. Bahasa, Konteks, dan Teks dalam Kumpulan Puisi *Mengkaji Bukit Mengeja Danau* Karya D. Zawawi Imron: Pandangan Semiotik Sosial
  - Dewi Angelina ~ 231
9. Pergeseran dan Keunikan Penggunaan Kata Sapaan dalam Masyarakat Etnik Jawa
  - Anastasia Erna Rochiyati Sudarmaningtyas ~ 247
10. Tren Komodifikasi Diksi dan Simbol Agama dalam Iklan Televisi di Indonesia
  - Edy Hariyadi ~ 265
11. Fungsi Pemakaian Bahasa dalam Masyarakat Multietnis dan Multilingual di Kelurahan Karang Taliwang
  - Baiq Rismarini Nursaly ~ 279

#### WACANA KESASTRAAN

1. Historiografi *Narrative*: Suatu Metodologi Sejarah Penelaahan pada *Genre Sastra Biografi*
  - Bambang Aris Kartika ~ 295
2. Daya Estetik Novel *Ronggeng Dukuh Paruk* Karya Ahmad Tohari: Kajian Stilistika
  - Ali Imron Al-Ma'ruf ~ 331

3. Simbol Nama dan Peristiwa dalam Drama *Panembahan Reso*  
Karya Ws Rendra: Kajian Hermeneutik
  - Titik Maslikatin ~ 347
4. Keunikan Tipografi Puisi Wiji Thukul: Apresiasi Sastra Berdasarkan Tipografinya
  - Achmad Naufal Irsyadi ~ 361
5. Memahami Sosiologi Sastra Alan Swingewood
  - Siswanto dan Furoidatul Husniah ~ 375
6. Kritik Sosial dalam Antologi Cerpen *Berhala* Karya Danarto  
Kajian Strukturalisme Genetik
  - Sarjinhah Zamzanah dan Titik Maslikatin ~ 385
7. Wanita yang Patut Diteladani dalam Novel *Ibuk* Karya Iwan Setyawan (Analisis Psikologi Wanita)
  - Sri Mariati ~ 399
8. Penggunaan Parikan dalam Album *Bossanova Jawa* Volume 1  
Sampai 5
  - Yerry Mijianti ~ 415
9. Manut Kiai: Pandangan Hidup Seorang Khaddam terhadap  
Dunia Pesantren Dalam Novel *Khaddam* Karya Diyana Millah  
Islami
  - Zahratul Umniyyah ~ 431
10. Representasi Perempuan *Single Parent* pada Novel *Perfect Pain*  
Karya Anggun Prameswari
  - Fiezu Himmah El Aa'many ~ 449
11. Aktualisasi Jiwa Kewirausahaan dalam Cerpen  
"Sajadah Cinta" Karya Desy
  - Sunarti Mustamar ~ 463
12. Nilai-Nilai Gender dalam Penulisan Puisi pada Tiga Penyair  
Gresik
  - Tsalits Abdul Aziz Al farisi ~ 477
13. Eksistensi Kartini dalam Novel *Kartini* Karya Abidah El  
Khalieqy: Kajian Feminisme Eksistensialis
  - Siti Aisah ~ 493



14. Representasi Pendidikan dalam Perspektif Budaya Masyarakat Dayak Ponti Tembawang pada *Batas Karya* Akmal Nasery Basral
  - Anidia Citra Prameswari, Maisaroh, Dian Ayu Lestari, Riatiningsih, Wulan Agustin, Dawud Nuhandika, Muhammad Idrus Ali Baharun ~ 503
15. Gandrung sebagai Identitas Budaya Using dalam Novel *Kerudung Santet Gandrung* Karya Hasnan Singodimayan
  - Nando Zikir M, Lathifatur Rohmah, Lailatul Mukarromah, Galang Garda S, Siti Komaria, Rizal Aminul M, Dimas Yohan A, Arofa Kamilia, Sasmi Puspa, Yahya Basit A ~ 519
16. Representasi Identitas dan Dialektika Lokal Global Roman *Namaku Teweraut* Karya Ani Sekarningsih
  - Gio Pramanda, Diana Purnawati, Dhea Praspa, Ainun Nafhah, Ajeng Yuditya, Delia Erli, Hanum Suciati, M. Prasta Aditya, Adhitya Haritz M. ~ 535
17. Representasi Perempuan dan Relasi Kuasa dalam *Tarian Bumi*
  - Nanda Roviko Ariviyani, Arini Aulia Haque, Kurnia Sudarwati, Fathorrahman Hidayah, Zamima Rahma Maulani, Jessyka Bella Eswigati, Siti Rahayu, Riris Nur Aini, Alvira Eka Ramadhani, Nike Lutvi Alfia. ~ 551
18. Representasi Kritik Sosial Antologi Puisi *Doa untuk Anak Cucu* Karya W.S. Rendra
  - Noviyah Purnamasari ~ 561
19. Representasi Pelecehan Seksual pada Novel *Jalan Panjang Menuju Pulang* Karya Pipiet Senja
  - Suci Annisa Caroline ~ 577
20. Hegemoni Budaya Adat Batak pada Novel *Menolak Ayah* Karya Ashadi Siregar
  - Ardhiansyah Roufin Affandi ~ 587
21. Solilokui Kepribadian Jawa dalam Cerita Panji Kuda Semirang Versi Poerbatjaraka
  - Dini Novi Cahyati, Endang Waryanti, dan Moch Muarifin ~ 599

## WACANA KEBUDAYAAN

1. Kejiman: Mekanisme Metodologis Penentuan Penari dan Waktu Pelaksanaan Ritual Seblang Olehsari, Banyuwangi
  - Heru S.P. Saputra, Titik Maslikatin, Edy Hariyadi ~ 615
2. Kegagalan Komunikasi Antaretnik di Wilayah Tapal Kuda
  - Bambang Wibisono dan Akhmad Haryono ~ 633
3. Mendadak Puitis: Politisasi Sastra dalam Kontestasi Pemilihan Umum 2019
  - Bayu Mitra A. Kusuma & Theresia Octastefani ~ 663
4. Habitus dalam Produksi Penanda dan Permaknaannya pada Film *Cinta*
  - Umilia Rokhani ~ 679
5. Mitos Mahesasura-Lembusura pada Situs Megalitikum Bondowoso: Sastra, Budaya, dan Sejarah Melayu Purba 1782 Sm
  - Sukatman ~ 691
6. Aspek Historis dan Budaya: Penamaan Bangunan Ikonik di Kampus Universitas Sebelas Maret dan Isi Surakarta dalam Perspektif Lanskap Bahasa
  - Muhammad Qomaruddin, Albertus Prasajo, Asep Yudha Wirajaya, Hary Sulistyono ~ 713
7. Kepemimpinan Jawa dalam Institusi Publik: Identitas Nasional dan Moral
  - Asri Sundari ~ 725
8. *Serat Pustakaraja* sebagai Sumber Ajaran Bagi Kepemimpinan Jawa: Analisis Pragmatik atas Teks Historiografi Jawa Abad XIX
  - Anung Tedjowirawan ~ 735
9. Transformasi Tokoh Semar dari Mahabharata India ke Mahabharata Jawa
  - Trisula Aji Manohara Sajati ~ 751

# **MENDADAK PUITIS: POLITISASI SASTRA DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM 2019**

**Bayu Mitra A. Kusuma & Theresia Octastefani**

Institute of Southeast Asian Islam, Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga & Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas  
Gadjah Mada

bayu.kusuma@uin-suka.ac.id  
& theresiaoctastefani@ugm.ac.id

## **Abstrak**

Dalam perjalanan bangsa Indonesia, relasi antara sastra dan politik seakan tak bisa dipisahkan, sehingga dapat dikatakan bahwa sastra adalah bagian integral dari perjuangan politik kebangsaan. Pada rezim Orde Baru, sastra adalah manifestasi dari perlawanan terhadap pembungkaman dan menjadi senjata dalam membuka pikiran rakyat dari cengkeraman rezim otoriter dan represif. Di sisi lain, sastrawan yang dianggap pro rezim dibiarkan berkarya untuk melegitimasi hegemoni. Dua dekade lalu, Orde Baru runtuh dan digantikan Era Reformasi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis apakah dunia sastra Indonesia akan melahirkan pujangga baru revolusioner yang mampu menjadi kontrol sosial di era kebebasan berekspresi ini ataukah sastra justru sekedar menjadi komoditas politik sebagai alat merengkuh kuasa belaka? Hasil analisis menunjukkan bahwa di Era Reformasi dengan segala kebebasan berpendapat ini, sastra melalui puisi dalam kontestasi politik tetaplah eksis meski mengalami distorsi. Di pemilu 2019 yang dipandang telah mempolarisasi kehidupan sosial ini, beberapa politisi tiba-tiba bermutasi menjadi pujangga dan mendadak puitis. Puisi dipolitisasi sebagai bagian dari strategi oposisi mencari dukungan rakyat untuk merebut kuasa dari petahana. Memang dari kubu petahana juga menghasilkan karya puisi serupa, namun itu hanyalah berupa reaksi dari serangan oposisi. Pada akhirnya, di pemilu 2019 ini puisi telah larut dalam hingar-bingar kontestasi meski tak selalu mengedepankan esensi.

**Kata kunci:** kontestasi politik, pemilu 2019, politisasi sastra, puisi

## A. PENDAHULUAN

Hajatan besar lima tahunan Indonesia telah dilaksanakan secara paripurna. Pemimpin bangsa untuk lima tahun ke depan telah ditentukan melalui proses demokrasi yang menyatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Layaknya hajatan besar pada umumnya, hasil dari pemilihan umum sulit untuk memuaskan semua pihak yang berkepentingan. Biasanya mereka yang tampil sebagai pemenang akan menyatakan rasa puas, sebaliknya mereka yang gagal umumnya akan muncul suara sumbang simbol rasa ketidakpuasan bahkan ratapan pada proses kontestasi yang telah berjalan. Namun, perlu diingat, jangankan pemilu sebagai kenduri demokrasi yang melibatkan emosi seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke, sekedar hajatan mantenan atau khitanan yang melibatkan beberapa rukun tetangga saja masih kerap meninggalkan catatan minor dan *rasan-rasan* pada masyarakat. Belum lagi ditambah budaya baru yang kini tengah naik daun, *nyinyir*.

Pada perhelatan pemilu kali ini, terdapat satu perbedaan mencolok apabila dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Apabila pada tahun-tahun sebelumnya pemilu presiden baru dilaksanakan setelah pemilu legislatif usai, pada tahun 2019 ini pemilu presiden dilaksanakan secara serentak dengan pemilu legislatif. Di satu sisi, pemilu model serentak ini memberikan berbagai keuntungan seperti penghematan waktu, anggaran, dan kebisingan *knalpot brong* motor peserta kampanye yang lebih cepat usai. Namun di sisi lain, pemilu model serentak juga membawa sisi negatif seperti gugurnya ratusan pahlawan demokrasi akibat kelelahan yang akut dan sikap masyarakat yang terlalu fokus pada pemilu presiden, seolah melupakan bahwa di samping pemilihan presiden dan wakilnya, juga ada pemilihan DPR Pusat, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD. Rilis dari lembaga survei Charta Politika Indonesia (2019:1) menunjukkan bahwa pemilu legislatif cenderung dilupakan oleh masyarakat karena euforia pelaksanaan pemilu presiden. Tentu kondisi ini menjadi tidak ideal bagi para calon legislatif yang mengincar empuknya kursi dewan, terutama bagi mereka yang berstatus *new comer* ataupun yang berjibaku dalam pertarungan daerah pemilihan (dapil) neraka.

Akibatnya, para calon legislatif tersebut berupaya mencari panggung alternatif yang lebih vulgar sebagai sarana eksistensi dan membangun citra diri atau citra visual agar dilirik oleh masyarakat sebagai *voters*. Dalam kondisi yang demikian, mengutip dari Alniezar (2019:37), tapal batas antara yang natural dan artifisial sudah sedemikian rapuh dan ambruk. Mereka telah bertungkus lumus dalam dunia gambar, simulasi visual, imitasi, stereotip, dan fantasi. Dari sekian strategi mencari panggung yang dilakukan para calon wakil rakyat, salah satu yang cukup menarik perhatian sekaligus memancing kontroversi adalah dengan jalur politisasi kesusastraan.

Pada dasarnya relasi antara sastra dan politik di Indonesia telah melewati masa yang sangat panjang, bahkan di masa pra-kemerdekaan atau perlawanan pada kolonial sekalipun. Karena itu tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa sastra tidak dapat dipisahkan dari perjuangan politik kebangsaan. Bung Karno dalam setiap orasinya selalu menggunakan rangkaian kata-kata yang penuh nilai estetis dengan cara yang puitis untuk menggelorakan semangat politik patriotik dan perlawanan rakyat. Sebagai contoh, dapat ditengok pidato Sang Proklamator dalam Konferensi Gerakan Non-Blok (GNB) pertama yang diselenggarakan di Kota Beograd, Yugoslavia, *"Masyarakat mereka yang mewah dibangun di atas keringat dan air mata dari jutaan manusia"*. Terlebih lagi pada masa demokrasi terpimpin ala Soekarno, gencar digaungkan istilah "politik sebagai panglima" (Samboja, 2010:3), yakni aktivitas apa pun harus dilakukan demi kepentingan politik, sehingga jelas bahwa dunia kesusastraan semakin tidak dapat terhindarkan dari kepentingan politik.

Dari fenomena di atas, dapat dikatakan bahwa keberadaan sastra dalam perjalanan perjuangan politik tidak hanya menarasikan sebuah kisah semata, lebih dari itu sastra juga dapat menyentuh rasio pemikiran dan meletupkan emosi setiap jiwa yang membacanya. Kombinasi rasio pemikiran dan emosi jiwa tersebut kemudian bertransformasi menjadi kekuatan fisik berdaya pukul kuat sebagai basis perlawanan sosial yang masif mulai dari tataran elit sampai ke level akar rumput. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah, setelah Orde Baru runtuh, mampukah dibangun kesadaran politik masyarakat melalui kesusastraan di Era Reformasi yang telah berusia

dua dekade ini, khususnya dalam kontestasi pemilu 2019? Apakah dunia sastra Indonesia akan melahirkan pujangga baru revolusioner yang mampu menjadi kontrol sosial dan penyeimbang bagi jalannya pemerintahan di era kebebasan berekspresi ini? Ataukah sastra justru sekedar menjadi komoditas politik sebagai alat merengkuh kuasa belaka?

## **B. PERLAWANAN KEPADA HEGEMONI REZIM**

Seorang penguasa dalam suatu sistem politik, baik di zaman perbudakan, feodalisme, kolonialisme, hingga dunia mulai memasuki era modern, selalu berupaya membentuk situasi yang mendukung kemapanannya. Tujuannya jelas, agar rakyat tetap tunduk di bawah hegemoni rezim penguasa dan melanggengkan kuasa. Dalam kondisi yang demikian, mereka yang tidak sepakat dengan hegemoni rezim tidak memiliki kekuatan mumpuni untuk melakukan perlawanan fisik secara sporadis. Melihat kebuntuan itu, jalan keluar yang bisa ditempuh salah satunya adalah membuka pikiran logika rakyat lewat goresan pena atau karya sastra. Karena itulah pada masa lampau pengawasan pada perkembangan kesusastraan sangat diperketat dan kemudian rezim menciptakan karya tandingan yang berfungsi sebagai corong propaganda dalam mempertahankan hegemoni.

Dalam belantara literatur, telah banyak penelitian mengenai eksistensi sastra dalam perlawanan politik sepanjang sejarah berdirinya Republik. Pasca-Indonesia merdeka, sastra merupakan salah satu sarana yang paling ampuh untuk melawan pembungkaman politik oleh rezim, terutama di masa Orde Baru. Pembungkaman tersebut tidak terlepas dari perilaku negara yang otoriter, birokratis, dan pemburu rente. Bentuk negara yang dibangun oleh Presiden Suharto dengan dalih pembangunan ekonomi telah melahirkan bentuk negara yang otoriter dan ditentukan oleh segelintir golongan birokrat yang hanya memikirkan rente (Budiman, 1991:59). Melawan dengan fisik seakan menjadi sinonim dari menuju penghilangan orang tanpa jejak atau bahkan peti kematian.

Perlawanan sastrawi terabadikan melalui lahirnya beberapa orang sastrawan besar yang oleh rezim penguasa dimanifestasikan

sebagai sosok liar dan gerombolan yang mengganggu, mulai dari W.S. Rendra yang kemudian dipenjarakan karena beberapa karyanya menohok hegemoni Orde Baru (Bourchier dan Hadiz, 2003:213-214), Sitor Situmorang yang dipenjara tahun 1967-1975 karena menulis esai mengenai sastra revolusioner (Aswarini, 2016:145), Pramoedya Ananta Toer sang penulis roman *Tetralogi Buru* di era Orde Baru (Bahari, 2003:62), hingga Wiji Thukul yang karya-karyanya seperti *Aku Ingin Menjadi Peluru* menggambarkan adanya represi terhadap pengarang dan juga masyarakat berkaitan dengan pembatasan bacaan dan kebebasan berekspresi (Putra, 2018:13).

Ketika para sastrawan pengkritik pemerintah dikirim ke jeruji besi atau bahkan hilang tanpa jejak, di saat yang bersamaan, sastrawan yang dianggap pro Orde Baru dengan menggambarkan rezim ini sebagai pemerintahan yang pancasilais, memiliki rasa nasionalisme tanpa batas, dan anti pada ideologi komunisme, tetap diizinkan untuk berkarya. Perbedaan pola tersebut menunjukkan bahwa sastra dimanfaatkan oleh rezim Orde Baru untuk memperkuat hegemoninya. Meski pada akhirnya, sastra jua yang ikut andil dalam menumbangkan rezim ini di tahun 1998. Bagi mereka yang datang berduyun-duyun untuk menduduki ibukota, tertanam suatu paham bahwa apabila sastra dapat membungkam suara politik perjuangan mereka, maka sastra juga dapat membangkitkan kesadaran politik rakyat untuk melawan.

Melihat luar biasanya perlawanan sastrawi di zaman Orde Baru yang otoriter dan represif, menjadi sangat menarik untuk melihat kelanjutannya di Era Reformasi yang *notabene* keran kebebasan berekspresi dibuka dengan selebar-lebarnya, khususnya pada ajang pemilu 2019 yang baru saja paripurna. Dengan demikian menjadi jelas bahwa *positioning* dari kajian ini terhadap riset-riset sebelumnya adalah sebagai penerus dan penyambung zaman. Kajian ini ingin melihat eksistensi sastra dalam pemilu 2019, manakala banyak orang memandang bahwa ini adalah salah satu pemilu paling sengit sekaligus paling gaduh dalam sejarah bangsa hingga mempolarisasi rakyat menjadi dua kutub yang saling bersengketa. Ini sekaligus pemilu yang juga membuat masyarakat menjadi sangat sulit untuk bersikap netral. Mengkritik nomor satu (Joko Widodo dan Ma'ruf

Amin) dianggap *auto* dukung nomor dua (Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno), begitu pula sebaliknya, mengkritik nomor dua maka dihakimi *auto* dukung nomor satu, sehingga sedikit pun masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk menjadi penengah.

### C. KETIKA POLITISI MENDADAK PUITIS

Pemilu 2019 dapat dikatakan sebagai salah satu pemilu paling melelahkan sekaligus penuh dengan kelucuan yang sebenarnya *absurd* dalam rentang masa kampanye yang panjang. Bahkan bisa saja terasa semakin panjang tatkala kita mulai lelah dengan berbagai intrik yang menyertainya, mulai dari politik identitas sampai dengan ancaman *people power*. Pentas pertunjukan politik Indonesia di tahun-tahun ini tampak begitu riuh rendah oleh berbagai pernyataan penuh kontroversi yang berdampak kepada semakin berputarnya tanda tanya di kepala masyarakat, gesekan antarpendukung yang semakin tak rasional hingga terpolarisasi menjadi *haters* dan *lovers*, demonstrasi berjilid-jilid atas nama bela agama, dan serangkaian pelaporan ke pihak kepolisian. Mulai dari istilah “politikus sontoloyo” sampai keceplosan “tampang Boyolali” yang sesungguhnya tidaklah kondusif bagi pendidikan politik masyarakat. Apalagi dalam pemilu kali ini angka pemilih pemula dari generasi milenial begitu tinggi. Oleh karena itu, ketepatan penggunaan bahasa menjadi suatu hal yang sebenarnya sangat esensial dalam mengungkap suatu realitas antara teks yang ada dengan konteks komunikasi baik secara lisan maupun tulisan (Faradi, 2015:233).

Dari suara riuh rendah tak kunjung usai tersebut, penulis tergelitik untuk mencoba memperhatikan lebih detail para politisi yang mendadak puitis. Tanpa bermaksud untuk memihak pada salah satu kandidat, penulis memandang memang ada salah satu kelompok yang lebih aktif menggunakan sastra sebagai pemantik isu, yaitu kubu oposisi yang sedang menantang petahana. Sebutlah nama Fadli Zon dan Neno Warisman sebagai laskar penggubah puisi bagi oposisi di garis depan. Memang terbitnya puisi sebenarnya tidak hanya dari kelompok oposisi semata, namun juga dari kubu petahana. Misalnya ada puisi karya Romahurmuziy dan Irma Suryani Chaniago. Dalam



hal ini penulis memiliki alasan mengapa dalam kajian ini lebih fokus pada puisi dari oposisi, yaitu: *Pertama*, respons masyarakat kepada puisi dari oposisi terasa lebih gaduh terutama di media sosial, baik dukungan maupun penolakan. *Kedua*, puisi dari kubu petahana biasanya hanya berupa respons atau reaksi setelah kubu oposisi melancarkan serangan via puisinya terlebih dahulu.

Sekali lagi ini bukanlah bentuk keberpihakan, melainkan analisis pada serangkaian fenomena yang dapat dilihat dengan kasat mata dan pikiran terbuka. Di dalam kelas ketika mengajar kuliah sekalipun, penulis selalu mewanti-wanti para mahasiswa untuk menggunakan *academic sense* dalam membicarakan fenomena ini, bukan menggunakan *baper sense* yang membuat analisis menjadi tidak netral bahkan memancing debat kusir kontraproduktif di dalam kelas. Penulis khawatir, apabila tidak dikaji secara bijak dan proporsional, perbedaan pilihan politik itu akan meruntuhkan kesopanan, memecah pertemanan, menggerogoti persaudaraan mahasiswa yang sudah terjalin sejak mereka masih mahasiswa baru. Penulis terus mengingatkan bahwa ketika mereka sakit, teman-temanlah yang mengantar ke puskesmas, bukan para politisi yang mereka bela. Ketika akhir bulan uang saku mulai menipis, sahabat-sahabatlah yang dengan sukarela memberikan pinjaman sekalipun mereka sendiri sebenarnya juga *bokek*, bukan para tim sukses yang tiap hari menjejalkan yel-yel kampanye.

Kembali ke topik utama, memang bagaimanapun oposisi dituntut selalu kreatif dalam memainkan isu karena menjungkalkan petahana bukanlah perkara mudah, terlebih petahana yang masih memiliki dukungan basis massa sangat kuat. Mari dimulai diskusi ini dengan fokus pada calon presiden sekaligus ikon dari kelompok oposisi, Prabowo Subianto. Pidato Prabowo dengan gaya khasnya yang berapi-api dan menggebu-gebu sempat menjadi viral karena dalam orasinya begitu mantap mengatakan bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030 (*Tempo*, 2019). Dengan yakin Prabowo menyampaikan bahwa bubarnya Indonesia di tahun 2030 adalah info valid yang didapatkannya dari kajian para ahli atau akademisi di luar negeri. Namun setelah viral, baru kemudian diketahui bahwa informasi tersebut bukanlah didapatkan dari para ahli atau akademisi,

melainkan dari sebuah novel fiksi berjudul *Ghost Fleet* karya Peter W. Singer. Pada pidato yang diunggah di media sosial milik Partai Gerindra tersebut, Prabowo mengatakan bahwa, “Di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian bahwa Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030”.

Begitu viralnya video pidato Prabowo tersebut hingga kemudian ikut menyeret nama Singer sebagai penulis novel. Dari narasi buku fiksi tersebut, ancaman-ancaman akan kehancuran dan bubarnya Indonesia seakan begitu dekat dan menjadi nyata setelah novel itu dikutip Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden dari kelompok oposisi tersebut. Sisi negatif sempat dituai Prabowo karena dianggap kurang jeli dalam membedakan mana hasil riset dan mana tulisan fiksi. Sisi positif justru dituai oleh sang penulis novel. Kini nama Peter W. Singer mulai dikenal dan bahkan ditelusuri informasinya oleh masyarakat Indonesia yang penasaran. Bahkan dapat dikatakan bahwa Singer harus memberikan ucapan terima kasih secara khusus kepada Prabowo Subianto yang telah mengorbitkan namanya dan membuatnya menjadi terkenal dalam belantika sastra di Indonesia.

Beralih dari orang nomor satu di kelompok oposisi, mari selanjutnya dilihat orang-orang yang berada di belakangnya. Mereka yang biasanya bertindak sebagai orator pengobar semangat penantang tiba-tiba bermutasi menjadi pujangga. Dalam lingkaran dalam ring satu oposisi, sebutlah nama Fadli Zon. Selama ini politisi Gerindra tersebut memang kerap menyoroti permasalahan bangsa terutama dari perspektif yang mengkritisi rezim. Bukan hanya menggunakan kata-kata kritik biasa, Fadli Zon pun kerap mengomentari kinerja pemerintah saat ini dan komentar tersebut dituangkan dalam puisi (Pasha, 2019). Meskipun sebenarnya apabila dilihat dari latar belakangnya, *make sense* juga apabila Fadli Zon mahir berpuisi. Fadli merupakan alumnus dari Jurusan Sastra Rusia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Dalam hal berpolitik, dia sejak tahun 2014 telah aktif membuat puisi tentang situasi kondisi perpolitikan di Indonesia dan makin mendekati pemilu 2019 makin produktif pula kuantitas puisi yang dia gubah.

Salah satu puisi yang paling fenomenal sekaligus kontroversial berjudul *Do'a yang Ditukar*. Dipandang fenomenal karena puisi

tersebut langsung menjadi pusat perhatian dari perpolitikan nasional dan disebut kontroversial karena dianggap tidak sopan pada kiai sepuh kharismatik Nahdlatul Ulama, KH. Maimoen Zubair. Mari ditengok bait demi bait puisi tersebut sebagaimana di bawah ini.

*Do'a sakral*

*Seenaknya kau begal, disulam tambal*

*Tak punya moral, agama diobral*

*Do'a sakral*

*Kenapa kau tukar, direvisi sang bandar*

*Dibisiki kacung makelar, skenario berantakan bubar*

*Pertunjukan dagelan vulgar*

*Do'a yang ditukar*

*Bukan do'a otentik, produk rezim intrik*

*Penuh cara-cara licik, kau penguasa tengik*

*Ya Allah, dengarlah do'a-do'a kami*

*Dari hati pasrah berserah, Memohon pertolongan-Mu*

*Kuatkanlah para pejuang istiqomah, di jalan amanah*

Dalam puisi tersebut Fadli Zon memang tidak menyebutkan secara presisi untuk merespons situasi apa, namun apabila dilihat dari rangkaian kata-katanya maka sangat kuat dugaan bahwa puisi tersebut disusun untuk menanggapi peristiwa saat Kiai Maimoen Zubair salah mengucapkan nama Jokowi menjadi Prabowo dan kemudian direvisi dalam sebuah doa setelah diingatkan oleh Romahurmuziy. Tak pelak puisi kontroversial tersebut memancing pujian sekaligus hujatan. Pujian tentu datang dari kawan politik, sedangkan hujatan datang dari lawan politik. Meskipun demikian, tetap perlu diingat bahwa dalam arena berpolitik tak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi.

Pasca-semakin produktifnya Fadli Zon mengubah puisi, banyak orang berseloroh bahwa sudah waktunya dia menerbitkan sebuah buku antologi puisi. Meskipun sebenarnya prediksi masyarakat tersebut hanyalah guyonan politik belaka, namun ternyata kejadian

juga. Sebagaimana dikutip dari *mojok.co*, sebuah media *online* bernada satir yang mempunyai semboyan *sedikit nakal, banyak akal*. Setelah sempat berkali-kali membuat puisi-puisi yang isinya berupa perlawanan dan kritik terhadap pemerintah, Fadli, selayaknya banyak penyair lainnya (itu juga kalau dianggap penyair) akhirnya membukukan puisi-puisinya (Mojok, 2019). Tepat pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, bertempat di Aljazeera Polonia Jakarta Timur, acara *launching* buku antologi puisi tersebut pun digelar.

Buku antologi puisi tersebut diberi judul besar *Ada Genderuwo di Istana*, merujuk pada salah satu judul puisinya yang dulu sempat heboh pada pertengahan bulan November 2019 tatkala Presiden petahana Joko Widodo menyebut janganlah para politisi menggunakan politik genderuwo yang menakut-nakuti rakyat seolah negara dalam keadaan darurat dan sekarat. Dipilihnya judul tersebut bukanlah tanpa alasan. Fadli Zon secara eksplisit menegaskan bahwa momen pemilu 2019 merupakan momentum untuk mengusir genderuwo—tentu genderuwo versi Fadli Zon dan oposisi—dari istana negara. Dalam peluncuran buku antologi tersebut tampak beberapa *public figure* dari kelompok oposisi yang selama ini dikenal dekat dengan Fadli meliputi Neno Warisman (yang juga dibahas dalam kajian ini terkait aksi baca doa sekaligus puisi kontroversialnya), Fahri Hamzah, dan Dahnil Anzar Simanjuntak. Selain itu juga tampak sejumlah musisi, artis, dan budayawan seperti Sang Alang, Tio Pakusadewo, Ridwan Saidi, Jose Rizal Manua, Camelia Malik, Evi Tamala, dan Fauzi Baadila. Peluncuran buku antologi puisi tersebut menurut Fadli Zon adalah bagian dari upaya mendinamiskan dunia politik melalui jalur budaya berupa sajak-sajak dan untaian puisi agar politik tidak melulu berisi hal-hal yang kaku dan monoton. Pertanyaannya adalah apakah puisi tersebut membuat orang terhibur, atau malah membuat suasana politik yang sudah kaku menjadi semakin kaku?

Terakhir kita beranjak pada Neno Warisman, artis lawas yang menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Apa yang membuat artis lawas ini kembali naik daun? Salah satu jawabannya adalah karena sebuah puisi yang juga diklaim sebagai sebuah doa. Puisi Neno Warisman dibacakan bak aksi teatrikal di acara Munajat 212 yang dipandang sangat pro oposisi

disorot sebab dianggap tak tepat membawa Tuhan ke ranah politik praktis (*Detik News*, 2019a). Puisi Neno begitu cepat viral di media sosial karena dianggap “mengancam Tuhan”. Terlebih dalam puisi tersebut Neno menggambarkan bahwa seolah pemilu 2019 sama dengan perang Badar, sebuah perang di zaman Nabi Muhammad yang sangat dahsyat. Berikut ini adalah sebagian puisi Neno yang banyak beredar.

*Ya Allah  
Jangan, jangan Engkau tinggalkan kami  
Dan menangkan kami  
Karena jika Engkau tidak menangkan  
Kami khawatir ya Allah  
Kami khawatir ya Allah  
Tak ada lagi yang menyembah-Mu*

Dari petikan di atas, sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa Neno telah menyeret-nyeret Tuhan dalam politik. Menurutnya puisi yang dia bacakan berisikan doa, sebuah doa yang dipanjatkan karena kegelisahannya melihat situasi bangsa yang menurutnya telah salah arah. Neno juga mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang ekspresif, sehingga dalam berdoa sekalipun dia akan melakukannya secara puitis karena dirinya adalah seorang seniman. Masih menurutnya, dia selalu menangis setiap kali berdoa. Neno mengatakan bahwa doa yang dibacakannya dalam puisi itu adalah doa yang dia suka dan sering dia baca. Alasannya karena doa itu dicontohkan oleh Rasulullah. Terhadap pernyataan tersebut terus terang penulis merasa lucu. Sepanjang hidup Rasulullah selalu penuh dengan doa-doa yang sangat mulia, tapi mengapa satu-satunya doa yang dipilih oleh Neno adalah doa Perang Badar. Tentu doa sekaligus puisi ini sangatlah politis.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif berkomentar bahwa puisi yang dibacakan Neno Warisman adalah suatu hal yang tak pantas (*Merdeka*, 2019). Lebih lanjut Buya berkata bahwa puisi yang dibacakan Neno Warisman memang merupakan doa Nabi Muhammad saat Perang Badar. Namun dalam konteks

yang sangat berbeda dengan pemilu, saat itu tentara Islam yang berjumlah 300 orang harus menghadapi tentara Quraish yang jumlahnya 200 ribu orang, jumlah yang sangat tidak seimbang. Kondisi tersebut sangat berbeda karena lawan dalam kontestasi politik juga merupakan seorang Muslim, bahkan seorang kiai atau ulama besar. Merespons puisi tersebut, Buya Syafii meminta Neno untuk tak mencampuradukan agama dan politik dengan cara yang tidak pantas, melainkan dengan adab dan sopan santun. Pernyataan senada juga dikemukakan oleh KH Mustofa Bisri atau Gus Mus. Beliau menilai bahwa adanya puisi mengutip doa perang badar yang dibacakan oleh Neno Warisman adalah akibat dari sikap politik yang berlebih-lebihan. Karena sikap berlebih-lebihan itulah mereka kemudian lupa akan sejarah perang tersebut (*Detik News*, 2019b).

Penulis mengutip pendapat dua ulama besar kharismatik tersebut tentu dengan alasan. Alasannya adalah: *pertama*, karena beliau berdua telah banyak makan asam garam kehidupan di berbagai rezim; *kedua*, mereka memiliki peranan besar dan sejarah panjang dalam menjaga persatuan bangsa kebhinekaan; dan *ketiga*, mereka bukanlah seorang partisan sehingga apa pun yang mereka sampaikan adalah demi kepentingan bangsa. Meski demikian, puisi Neno tetaplah tak sepi dari para pembela, tentunya pembela yang berasal dari kawan politiknya. Puisi Neno juga tetaplah laku di tengah masyarakat karena meskipun politis, puisi tersebut mendapat sentuhan *packaging* nuansa Islam. Hal ini mengingatkan penulis pada temuan penelitian Ricklefs (2012:275) bahwa di Indonesia simbol dan konsep Islam begitu atraktif dalam kontestasi politik. Hal inilah yang terus menerus dimainkan Neno dan kawan-kawan.

Jika dipahami secara lebih mendalam, bisa dilihat perbedaan antara karya sastra terkait situasi politik yang dihasilkan di era Orde Baru dan di Era Reformasi. Jika di bawah rezim Orde Baru puisi adalah manifestasi dari perlawanan atas pembungkaman dan kebiri atas kebebasan berpendapat, maka di Era Reformasi—khususnya pada pemilu 2019—puisi adalah bagian dari upaya oposisi menarik dukungan rakyat dalam merebut kekuasaan dari petahana. Politisi merupakan manusia yang memang memiliki tabiat alami untuk selalu berusaha mencapai berbagai keinginan dan tujuan. Salah satunya

adalah untuk mendapatkan kekuasaan, baik secara individu maupun berkelompok (Kusuma dan Octastefani, 2017:10). Pada akhirnya, marilah dipulangkan semua *keruwetan* di atas pada kata mutiara dari John F. Kennedy, *"Jika politik itu kotor, maka puisi akan membersihkannya. Jika politik itu bengkok, sastra akan meluruskannya"*. Tujuannya jelas agar kita bisa memanusiaikan manusia dan bertindak lebih bijaksana.

#### D. SIMPULAN

Relasi antara sastra dan politik dalam lintas waktu perjalanan bangsa Indonesia telah melewati masa yang sangat panjang, mulai dari masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi yang telah berjalan dalam dua dekade terakhir. Karena itu pantaslah apabila dikatakan bahwa sastra tidak dapat dipisahkan dari perjuangan politik kebangsaan itu sendiri. Dahulu di bawah rezim Orde Baru, puisi adalah bentuk nyata dari perlawanan atas pembungkaman dan kebiri atas kebebasan berpendapat. Akibatnya mereka yang dianggap vokal melalui sastra lantas dianggap sebagai gerombolan liar yang terkadang begitu saja hilang tanpa bisa dilacak keberadaanya. Puisi benar-benar menjadi senjata dalam membuka pikiran rakyat dan menjadi penyulut perlawanan pada rezim Orde Baru yang dianggap otoriter dan represif. Di sisi lain sastrawan yang dianggap pro rezim Orde Baru dibiarkan tetap berkarya untuk melegitimasi hegemoni. Saat ini di Era Reformasi, era yang setiap insan bebas menyuarakan aspirasi politiknya dengan dalil kebebasan berpendapat, sastra melalui puisi tetaplah eksis meski mengalami distorsi. Pada pemilu 2019 yang dipandang sebagai salah satu pemilu paling melelahkan dan mempolarisasi kehidupan sosial, puisi adalah bagian dari upaya pihak oposisi menarik dukungan rakyat dalam merebut kuasa dari pihak petahana. Sebagai catatan akhir, harus diingat bahwa pada Era Reformasi ini kita memang memiliki kebebasan berpendapat, namun perlu diingat bahwa kebebasan tersebut tidaklah bersifat absolut. Ada hukum yang membatasi kebebasan tersebut agar tetap di dalam koridor kepatutan dan tak merugikan pihak yang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alniezar, Fariz. 2019. *Homo Homini Humor, Kelakar Agama: Dari Pendo(s)a Sampai Dinas Gangguan Mental Beragama*. Yogyakarta: BasaBasi.
- Aswarini, Ni Made Frischa. 2016. "Bertumpang-tindihnya Kategori Sejarah: Analisis Sosio-historik Sajak-Sajak Sitor Situmorang di Era Reformasi 1998-2005". *Humanis: E-Jurnal Fakultas Sastra dan Budaya UNUD*, 15(3):144-151.
- Bahari, Razif. 2003. *Remembering History, W/Righting History: Piecing the Past in Pramoedya Ananta Toer's Buru Tetralogy*. New York: Cornell University.
- Bourchier, David dan Hadiz, Vedi R. 2003. *Indonesian Politics and Society: A Reader*. London dan New York: Routledge.
- Budiman, Arief. 1991. *Negara dan Pembangunan: Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*. Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas.
- Charta Politik Indonesia. 2019. "Pileg 2019: Pemilu yang Terlupakan?". *Press Release Survey Nasional*. Dipresentasikan pada tanggal 4 April 2019.
- Detik News. 2019a. "Puisi Munajat 212 dan Do'a Kesukaan Neno Warisman". <https://news.detik.com/berita/d-4451264/puisi-munajat-212-dan-doa-kesukaan-neno-warisman> (diakses 7 Mei 2019).
- Detik News. 2019b. "Kata Gus Mus Soal Puisi Do'a Perang Badar". <https://news.detik.com/berita/d-4457113/kata-gus-mus-soal-puisi-doa-perang-badar> (diakses 9 Mei 2019).
- Faradi, Abdul Aziz. 2015. "Kajian Modalitas Linguistik Fungsional Sistemik pada Teks Debat Capres-Cawapres Pada Pilpres 2014-2019 dan Relevansinya dengan Pembelajaran Wacana di Sekolah". *Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa*, 1(2):233-249.
- Kusuma, Bayu Mitra A. dan Octastefani, Theresia. 2017. "Negosiasi Dakwah dan Politik Praktis: Membaca Orientasi Organisasi Sayap Keagamaan Islam pada Partai Nasionalis". *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2(1):1-24.



- Merdeka. 2019. "Buya Syafii Luruskan Arti Do'a Perang Badar yang Dibaca Neno Warisman". <https://www.merdeka.com/peristiwa/buya-syafii-luruskan-arti-doa-perang-badar-yang-dibaca-neno-warisman.html> (diakses 9 Mei 2019).
- Mojok. 2019. "Setelah Bikin Puisi Berkali-kali, Fadli Zon Akhirnya Luncurkan Buku Antologi Puisi "Ada Genderuwo di Istana"". <https://mojok.co/red/rame/kilas/fadli-zon-luncurkan-buku-antologi-puisi-ada-genderuwo-di-istana/> (diakses 7 Mei 2019).
- Pasha, Afifah Cinthia. 2019. "Kumpulan Puisi Karya Fadli Zon, Do'a yang Ditukar". <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3889488/kumpulan-puisi-karya-fadli-zon-paling-baru-berjudul-doa-yang-ditukar> (diakses 7 Mei 2019).
- Putra, Candra Rahma W. 2018. "Rekam Jejak dalam Puisi Wiji Thukul: Kajian Sosiologi Sastra Alan Swingewood". *Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 4(1):12-20.
- Ricklefs, Merle C. 2012. *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural, and Religious History c. 1930 to the Present*. Singapura: National University of Singapore Press.
- Samboja, Asep. 2010. *Historiografi Sastra Indonesia 1960-an*. Jakarta: Bukupop.
- Tempo. 2019. "Pidato Prabowo Kutip Buku Fiksi, Ini Cuitan Penulisnya". <https://gaya.tempo.co/read/1072222/pidato-prabowo-kutip-buku-fiksi-ini-cuitan-penulisnya/full&view=ok> (diakses 7 Mei 2019).

Kata kunci teori sastra kritis adalah memberikan pilar terbaru untuk memahami karya sastra. Pemaknaan karya sastra dari perspektif antropologi sastra, ekologi sastra, *culture studies*, gastronomi sastra, zoologi sastra, dan botani sastra. Pemaknaan sastra dalam wawasan teori kritis lebih lentur, tidak ada yang salah, melainkan bersifat relatif. Sastra itu sebuah bingkisan makna, yang dipoles-poles, sehingga penafsir dengan gigih perlu bersikap kritis. Eksplorasi makna yang menggabungkan berbagai ragam ilmu di luar sastra boleh-boleh saja. Kecurigaan awal memang selalu ada. Namun, lambat laun pemaknaan sastra secara kritis tentu akan diminati banyak pihak (Endraswara, 2019).



Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Jember



**KEPEL**  
Press  
Penerbit Kepel Press

